



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang rencananya akan dilaksanakan Tahun 2022 penentuan target dan sasaran yang akan di capai pada tahun 2022 yang didasarkan pada sasaran dan indikator yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Periode 2019 – 2024. Penyusunan RENJA Tahun 2022 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ini di susun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM. Kami menyadari dokumen ini masih belum sempurna, masukan dan koreksi sangat diharapkan guna perbaikan-perbaikan diwaktu yang akan datang.

Demikian RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2022 ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, Oktober 2021

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Lampung,



Drs. SAMSURIJAL, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19670418 199203 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
II. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	5
2.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja SKPD Tahun 2020 S/d triwulan IV	5
2.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Renstra Tahun 2020	10
III. TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2022	12
3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	12
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD	13
3.3 Isu-Isu Stategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	14
IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022	15
4.1 Program dan Kegiatan	15
V. PENUTUP	22
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Realisasi pelatihan yang bersumber dari DAK Non Fisik Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada APBD T.A 2020	5
Tabel 2.2. Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2020 s/d Triwulan 4	10
Tabel 3.1. Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2022	13

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan program pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan program pembangunan 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman pembangunan tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Lampung ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 1 (satu) tahun. Penyusunan RENJA ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi Lampung untuk lima tahun ke depan.

Penyusunan RENJA ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di tahun 2022 yang diselaraskan dengan tema pembangunan nasional 2022 dan prioritas pembangunan nasional 2022 serta tema pembangunan dan Provinsi Lampung 2022 dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung 2022.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2022 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.
6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
7. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
10. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239 Tahun 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan 2029.
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA Tahun 2022 ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah perencanaan, kebijakan dan program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2022.

1.3.2 Maksud

Tujuan Penyusunan RENJA Tahun 2022 ini adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan di tahun 2022 yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 Pemerintah Provinsi Lampung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1.4.1 BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

1.4.2 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

Bab ini memuat informasi tentang Evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2020 dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

1.4.3 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRA DAN KEGIATAN

Bab ini memuat analisis kebijakan nasional dan provinsi, sasaran dan tujuan serta rencana program dan kegiatan tahun 2022.

1.4.4 BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renja Dinas Koperasi dan UKM, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta catatan dan harapan kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

II. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja OPD Tahun 2020 s/d Triwulan 4

Adapun realisasi capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan 4 tahun 2020 dapat dilihat pada uraian berikut :

➤ **Program Utama (7 Program) terdiri dari :**

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp. 110.796.500,- terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

1. Koordinasi Kelembagaan dan up-dating Data Keragaan Koperasi Rp. 4.800.000,- kegiatan difocusing
2. Penyuluhan Perkoperasian Rp. 2.200.000,- kegiatan di refocusing
3. Penguatan Organisasi, Tata Kelola Koperasi dan Pendampingan RAT Rp. 67.149.250,- dengan target kinerja jumlah koperasi yang melakukan RAT sebanyak 37 koperasi dan kegiatan sudah dilaksanakan
4. Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi Rp. 36.647.250,-, kegiatan mengalami refocusing dan sudah dilaksanakan berupa peringatan harkop secara online

2. Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Koperasi Rp. 348.525.500,- terdiri dari 3 kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Usaha bagi Koperasi Rp. 348.525.500,- kegiatan mengalami refocusing tetapi kemudian mendapatkan tambahan dana DID sebesar Rp. 333.680.000,- dan sudah dilaksanakan
2. Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha bagi Koperasi Rp. 0,- kegiatan mengalami refocusing
3. Peningkatan Akses Permodalan Bagi Koperasi Rp. 0,- kegiatan mengalami refocusing

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 21.890.000,- terdiri dari 3 kegiatan yaitu :

1. Pengawasan penerapan aturan perkoperasian dan pemberian sanksi Rp. 0,- kegiatan mengalami refocusing
 2. Penilaian kesehatan koperasi Rp. 21.890.000,- kegiatan mengalami refocusing dengan target kinerja jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya sebanyak 10 koperasi dan sudah dilaksanakan
 3. Pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi Rp. 0,- kegiatan mengalami refocusing
- 4. Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM Rp. 2.430.000.000,- terdiri dari 4 kegiatan yaitu :**
1. Peningkatan fasilitas layanan UPTD Badiklatkop dan UMKM Rp. 12.500.000,- kegiatan sudah dilaksanakan
 2. Pelatihan Kewirausahaan Rp. 0,- kegiatan mengalami refocusing
 3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM Rp. 2.400.000.000,- kegiatan sudah dilaksanakan sebanyak 780 orang yang sudah dilatih dari target 780 orang
 4. Monitoring dan Evaluas Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM Rp. 17.500.000.- kegiatan sudah dilaksanakan

Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik sebesar Rp. Rp. 2.400.000.000,- (*Dua milyar empat ratus juta rupiah*) yang akan digunakan untuk pelatihan-pelatihan bagi koperasi dan umkm sebanyak 20 Pelatihan dengan total peserta yang dilatih sebanyak 730 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Realisasi pelatihan yang bersumber dari DAK Non Fisik Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada APBD T.A 2020

NO	DIKLAT DAN PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	LOKASI	KET
1	Pelatihan audit koperasi	35 Orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
2	Pelatihan pembukuan koperasi baru	40 Orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
3	Pelatihan pembukuan koperasi berbasis komputer	35 Orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
4	Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pengurus dalam RAT	35 Orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
5	Pelatihan penyusunan laporan keuangan dan penilaian kesehatan usaha bagi koperasi	35 Orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
6	Pelatihan pengawas bagi pengawasa koperasi	40 Orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan

NO	DIKLAT DAN PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	LOKASI	KET
7	Pelatihan tatalaksana RAT koperasi kab Tanggamus	35 Orang	Tanggamus	Sudah dilaksanakan
8	Pelatihan akutansi bagi koperasi	35 Orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
9	Pelatihan pembukuan koperasi sektor riil	35 orang	Way Kanan	Sudah dilaksanakan
10	Pelatihan kewirausahaan kelompok pemuda	40 Oarang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
11	Pelatihan menejemen usaha bagi kelompok wanita	40 Oarang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
12	Pelatihan untuk produk halal bagi umkm	40 Orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
13	Bimbingan teknis tenaga pendamping	25 Orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
14	Pelatihan vocational bidang makanan lampung selatan	35 Orang	Lampung Selatan	Sudah dilaksanakan
15	Pelatihan vocational desain produk bagi umkm	40 Orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
16	Pelatihan vocational bidang makanan dan minuman lampung barat	35 Orang	Lampung Barat	Sudah dilaksanakan
17	Pelatihan vocational bidang pariwisata Pesisir Barat	35 Orang	Pesisir Barat	Sudah dilaksanakan
18	Pelatihan berbasis e commerce bagi umkm	40 Orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
19	Pelatihan digital marketing bagi umkm	40 Orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
20	Pelatihan sertifikasi kompetensi bagi kepala cabang/meneger ksp/usp	35 Orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan

5. Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Rp. 3.999.420.000,- terdiri dari 3 kegiatan yaitu :

1. Pendataan dan Pembinaan UMKM Rp. 37.269.999,- kegiatan sudah dilaksanakan dengan target kinerja jumlah sinkronisasi data umkm sebanyak 15 data. Kegiatan ini mendapatkan tambahan pagu dana dari dana DID sebesar Rp. 3.406.379.000,- untuk penanganan dampak covid-19 yaitu berupa pengadaan masker dan sudah dilaksanakan
2. Pembinaan Kelompok Usaha Pemula Rp. 0,- kegiatan mengalami refocusing tetapi kemudian mendapatkan tambahan pagu dari DID untuk penanganan covid-19 sebesar Rp. 323.941.000,- dan sudah dilaksanakan
3. Pengembangan dan Promosi Produk-Produk Unggulan Daerah Rp. 231.831.000,- kegiatan sudah dilaksanakan

6. Program Peningkatan Pembiayaan Usaha bagi Koperasi dan UMKM Rp. 562.804.723,- terdiri dari 3 kegiatan yaitu :

1. Evaluasi Kinerja Pelayanan Pembiayaan KUMKM Rp. 0,- kegiatan mengalami refocusing
2. Pendampingan Usaha bagi Calon/ Penerima Dana Bergulir Rp. 0,- kegiatan mengalami refocusing
3. Peningkatan Pelayanan Pembiayaan terhadap KUMKM Rp. 562.804.723,- kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan sudah dibekukannya operasional UPTD BLUD Perkuatan Permodalan KUMKM dimana kegiatan tersebut adalah RBA BLUD

7. Program Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Rp. 376.500.000,- terdiri dari 3 kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Kinerja Layanan PLUT Rp. 57.500.000,- kegiatan sudah dilaksanakan. Kegiatan ini juga mendapat tambahan pagu dari dana DID sebesar Rp.54.024.000,- untuk penanganan dampak covid-19
2. Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran bagi KUMKM Mitra Binaan PLUT Rp. 0,- kegiatan mengalami refocusing tetapi kemudian juga mendapat alokasi tambahan dana DID sebesar Rp. 164.976.000,- untuk penanganan dampak covid-19 dan sudah dilaksanakan
3. Peningkatan Layanan Usaha bagi KUMKM Mitra Binaan PLUT Rp. 0,- kegiatan mengalami refocusing tetapi kemudian juga mendapat alokasi tambahan dana DID sebesar Rp. 100.000.000,- untuk penanganan dampak covid-19 dan sudah dilaksanakan

➤ **Program Penunjang (4 program) terdiri dari :**

1. Program Pelayanan Administarsi Perkantoran Rp. 1.343.144.300,- terdiri dari 12 kegiatan yaitu:

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 384.293.700,- kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100 persen
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 258.610.000,- kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100 persen
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 140.000.000,- kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100 persen
4. Penyediaan alat tulis kantor Rp. 14.500.000,- kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100 persen

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 15.000.000,- kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100 persen
 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 72.800.000,- kegiatan telah dilaksanakan 100 persen
 7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik Rp. 7.500.000,- kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100 persen
 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 10.000.000,- kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100 persen
 9. Penyediaan makanan dan minumam Rp. 15.000.000,- kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100 persen
 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rp. 123.640.600,- kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100 persen
 11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Rp. 116.100.000,- kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100 persen
 12. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Rp. 215.700.000,- kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100 persen
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 218.120.000,- terdiri dari 3 kegiatan yaitu:**
1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 25.000.000,- kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100 persen
 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 168.120.000,- kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100 persen
 3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rp. 25.000.000,- kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100 persen
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Rp. 33.192.500,- terdiri dari 2 kegiatan yaitu :**
1. Pengembangan Budaya Rp. 6.252.000,- kegiatan telah dilaksanakan 100 persen
 2. Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Rp. 26.940.500,- kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100 persen

4. Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah Rp. 264.297.900,- terdiri dari 5 kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Rp. 41.160.000,- kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100 persen
2. Penyusunan Laporan Capaian Keuangan Rp. 12.500.000,- kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100 persen
3. Penyusunan dokumen perencanaan Rp. 103.897.900,- kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100 persen
4. Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan Rp. 0,- (refocusing)
5. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset Rp. 106.740.000,- kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100 persen

2.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Renstra Tahun 2020

Capaian kinerja pada sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM Povinsi Lampung dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2020 s/d Triwulan 4

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (6/5* 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel	1. Persentase Koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi (%))	21,76 %	22,19 %	101,97 %
			2. Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi Kompetensi (%)	5,03 %	7,03 %	139,76 %
		1. Meningkatkan wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Penumbuhan Wirausaha pemula (%)	92 %	94 %	102,17 %
			2. Persentase Perkembangan umkm yang meningkat akses permodalan, pemasaran produk, dan kualitas SDM nya (%)	90 %	116,91 %	129,9 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sangat baik dan telah memenuhi harapan dimana semua sasaran startegis telah tercapai. Persentase tertinggi ada pada indikator Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi Kompetensi dari target 5,03 persen tercapai sebesar 7,03 persen atau tercapai sebanyak 139,76 persen sedangkan capaian terendah ada pada indikator Persentase Koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi) dimana dari target 21,76 persen tercapai 22,19 persen atau 101,97 persen. Untuk indikator persentase penumbuhan wirausaha pemula yang ditargetkan 92 Persen tercapai 94 persen atau tercapai sebesar 102,17 persen dan indikator persentase Perkembangan umkm yang meningkat akses permodalan, pemasaran produk, dan kualitas SDMnya sebesar 90 persen tercapai 116,91 persen atau sebesar 129,9 persen. Pencapaian ini masih di dalam jalur yang direncanakan hingga akhir tahun Renstra Tahun 2019-2024.

III. TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2022

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Guna mewujudkan kesinambungan pembangunan, pemerintah telah merancang prioritas pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2022 mendatang. Oleh karenanya, Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk mendukung suksesnya pencapaian prioritas nasional yaitu :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonom

Sejalan dengan Prioritas Nasional dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2022 maka pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Tema Pembangunan Tahun 2022 yaitu ***“Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan SDM Berkualitas”***.

Selanjutnya untuk mendorong percepatan pembangunan, pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Lampung telah merancang 6 (enam) Prioritas Pembangunan dimana terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Lampung, masuk dalam mengemban Prioritas Pembangunan ke 1 (satu) yaitu **“MENINGKATKAN INVESTASI DAN NILAI TAMBAH PRODUK UNGGULAN”**.

Berikut ini adalah Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022.

1. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi Birokrasi
5. Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

Sesuai dengan RENSTRA Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Periode 2019-2024, ada 1 (satu) tujuan yang akan di capai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yaitu **“Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi”**

Sedangkan Sasaran Utama Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang akan di lakukan pada tahun 2022 yaitu:

1. Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas
2. Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha

Selengkapnya indikator kinerja dan target sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1. Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2022
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	1 Persentase Koperasi Yang Berkualitas	34,26
		1. Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	1 Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	3,29

3.3 Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan utama terkait dengan Pengelolaan Koperasi dan UMKM adalah Rendahnya Daya Saing Koperasi dan UMKM serta Iklim Usaha yang Belum Kondusif bagi Koperasi dan UMKM. Selain itu beberapa masalah lain seperti masih rendahnya kesehatan serta kepatuhan koperasi dalam menaati aturan perkoperasian, rendahnya kualitas SDM yang berkompeten sehingga berdampak pada kinerja manajemen, lemahnya penguasaan akses teknologi tepat guna maupun moderen, kualitas produk hasil UMKM masih rendah, rendahnya kewirausahaan, lemahnya akses dan penguasaan pasar, belum terbangunnya jejaring dalam pemasaran produk hasil UKM, masih lemahnya pengembangan pola kemitraan dan jejaring usaha maupun jasa, terbatasnya dukungan prasarana dan sarana usaha, lemahnya kemampuan berinovasi, dan kurangnya informasi juga mempengaruhi kinerja Koperasi dan UMKM. Berdasarkan uraian dan permasalahan-permasalahan pembangunan di atas, maka isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat disarikan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas tata kelola organisasi kelembagaan koperasi terlihat dari rendahnya koperasi yang melakukan RAT
2. Masih rendahnya daya saing usaha koperasi
3. Masih rendahnya kesehatan serta kepatuhan koperasi dalam menaati aturan perkoperasian
4. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku Koperasi dan UMKM
5. Masih rendahnya kewirausahaan
6. Masih rendahnya daya saing usaha UMKM dari sisi permodalan, jaringan usaha dan pemasaran produk

IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

4.1 Program dan Kegiatan

Penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2022 ini berdasarkan **Kepmendagri nomor 050-3708 Tahun 2020** tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dengan anggaran tersebut diatas direncanakan akan digunakan untuk menjalankan 8 (delapan) program dan 14 (empat belas) kegiatan serta 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Berikut ini adalah rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 :

➤ **Program Penunjang (1 program) terdiri dari :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 12.423.957.000,00,- terdiri dari 6 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 132.377.000,- Indikatornya adalah Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100 Persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 105.819.000,- indikatornya jumlah dokumen perencanaan sebanyak 13 dokumen
 - b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 26.558.000,- indikatornya jumlah dokumen evaluasi kinerja sebanyak 11 dokumen
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 10.585.488.908,38,- Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 10.535.488.908,38,- indikatornya jumlah bulan penyediaan gaji ASN sebanyak 12 bulan

- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp. 10.000.000,- indikator nya Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD selama 12 bulan
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp. 10.000.000,- indikatornya Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD sebanyak 1 dokumen
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp. 30.000.000,- indikatornya Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD sebanyak 17 dokumen
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp. 20.000.000,- Indikatornya adalah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 10.000.000,- indikatornya Jumlah bulan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD selama 12 bulan
 - b) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 10.000.000,- indikatornya Jumlah bulan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD selama 12 bulan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 445.744.091,62,- Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebanyak 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 10.000.000,- indikatornya Jumlah layanan komponen instalasi listrik yang tersedia selama 12 bulan
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 25.000.000,- indikatornya Jumlah layanan peralatan rumah tangga yang tersedia selama 12 bulan

- c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 13.121.091,62,- indikatornya Jumlah layanan barang cetakan yang tersedia selama 12 bulan
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material Rp. 30.000.000,- indikatornya Jumlah layanan bahan material yang tersedia selama 12 bulan
 - e) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp. 40.000.000,- indikatornya Jumlah layanan kunjungan tamu selama 12 bulan
 - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 327.623.000,- indikatornya Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 816.347.000,- indikatornya adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 361.347.000,- indikatornya Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 455.000.000,- indikatornya Jumlah Layanan jasa pelayanan umum kantor selama 12 bulan
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 424.000.000,- indikatornya adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 75.000.000,- indikatornya Jumlah layanan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan selama 12 bulan
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan Rp. 289.000.000,- indikatornya Jumlah layanan pemeliharaan kendaraan dinas operasional selama 12 bulan

c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 10.000.000,- indikatornya Jumlah layanan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya selama 12 bulan

d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 50.000.000,- indikatornya Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya selama 12 bulan

➤ **Program Utama (7 Program) terdiri dari :**

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 511.500.000, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 245.697.000,- indikator Persentase Kelompok/Koperasi Yang Diberi Penyuluhan Kelembagaan dan Izin Usaha Koperasi sebesar 100 persen dengan sub kegiatan yaitu :

a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 245.697.000,- dengan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah kelompok/koperasi yang diberi penyuluhan perkoperasian sebanyak 30 kelompok

2. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 265.803.000,- indikator kegiatannya adalah Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya sebesar 100 persen dengan sub kegiatannya yaitu :

a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam

1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. Rp. 265.803.000,- dengan indikator sub kegiatannya adalah Jumlah koperasi yang difasilitasi pelayanan izin pembentukan dan pembukaan cabang/kantor koperasi sebanyak 30 koperasi

2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 150.000.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 150.000.000,- dengan indikator kegiatannya adalah Persentase Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya sebanyak 100 persen. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

- a) Sub kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan Kepatuhan Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat Rp. 75.000.000,- dengan indikatornya yaitu Jumlah Koperasi yang diawasi/diperiksa Kelembagaan dan Usahanya sebanyak 40 koperasi
- b) Sub kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat Sehat Mandiri Tangguh serta Akuntabel Rp. 75.000.000,- indikatornya adalah Jumlah Koperasi yang telah diperiksa kepatuhan terhadap ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 40 koperasi

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Rp. 100.000.000,- terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. Rp. 100.000.000,- indikatornya adalah Persentase Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya sebanyak 100 persen dengan sub kegiatan yaitu :
 - a) Sub kegiatan Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Rp. 100.000.000,- dengan indikator sub kegiatan Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya sebanyak 45 koperasi.

**4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Rp. 2.582.464.000,-
Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan Yaitu :**

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 2.582.464.000,- indikatornya adalah Persentase SDM Koperasi Yang Meningkatkan Kompetensi dan Pengetahuannya sebesar 100 persen

a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp. 2.582.464.000,- indikatornya adalah Jumlah peserta pelatihan sebanyak 916 orang.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 2.419.964.000,- (dua milyar empat ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang akan digunakan untuk pelatihan-pelatihan bagi koperasi dan umkm sebanyak 16 Pelatihan dengan total peserta yang dilatih sebanyak 846 orang.

5. Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Rp. 275.000.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 275.000.000,- indikator kegiatannya adalah Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha sebanyak 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Rp. Rp. 275.000.000,- indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Koperasi yang meningkat daya saing usaha Koperasi dari sisi kualitas dan fasilitasi usaha, permodalan serta perlindungan usaha koperasi sebanyak 30 koperasi

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Rp. 1.500.000.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Rp. 1.500.000.000,- indikator kegiatannya adalah Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan sebanyak 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Rp. Rp. 1.500.000.000,- indikator sub kegiatannya adalah Jumlah UMKM dan wirausaha pemula yang difasilitasi pengembangan usaha dengan target 100 UMKM

7. Program Pengembangan UMKM Rp. 318.000.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Rp. 318.000.000,- indikator kegiatannya adalah Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya sebanyak 100 persen. Sub kegiatannya sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi Rp. 318.000.000,- dengan indikator sub kegiatannya adalah Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usahanya dari sisi permodalan, produksi dan pemasaran serta jaringan usahanya sebanyak 175 UMKM

V. PENUTUP

Penyusunan RENJA Tahun 2022 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ini di susun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi dan UKM. Keberhasilan pelaksanaan RENJA Tahun 2022 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung di tentukan oleh dukungan dari seluruh pegawai dan pelaku usaha Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung.

Dengan tersusunnya RENJA Tahun 2022 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung maka sasaran pembangunan di bidang Koperasi dan UKM ditandai dengan target capaian kinerja dalam tahun 2022 telah tergambar dan tercatat dengan jelas sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dapat di ukur dan dinilai keberhasilannya.

LAMPIRAN

**RENCANA KERJA
BERDASARKAN URUSAN, PPROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

OPD : DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA (Outcome/ Output)	TARGET DAN PAGU ANGGARAN 2022		KETERANGAN
				TARGET KINERJA	PAGU (RP)	
1	2	3	4	5	6	7
2.	KOPERASI DAN UKM				17,860,921,000.00	
2. 1 7.	DINAS KOPERASI DAN UKM				17,860,921,000.00	
2. 1 7. 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100%	12,423,957,000.00	
2. 1 7. 1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	132,377,000.00	
2. 17 . .	01 1. 01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Lampung	Jumlah Dokumen perencanaan	13 Dok	105,819,000.00	
2. 17 . .	01 1. 01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Lampung	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja	11 Dok	26,558,000.00	
2. 1 7. 1.	1. 0 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	10,585,488,908.38	
2. 17 . .	01 1. 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Lampung	Jumlah bulan penyediaan gaji ASN	12 Bln	10,535,488,908.38	
2. 17 . .	01 1. 02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Lampung	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bln	10,000,000.00	
2. 17 . .	01 1. 02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Lampung	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dok	10,000,000.00	
2. 17 . .	01 1. 02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Lampung	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD	17 Dok	30,000,000.00	
2. 1 7. 1.	1. 0 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	20,000,000.00	
2. 17 . .	01 1. 03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Lampung	Jumlah bulan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bln	10,000,000.00	
2. 17 . .	01 1. 03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Lampung	Jumlah bulan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bln	10,000,000.00	

1					2	3	4	5	6	7
2.	1	0	1.	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	445,744,091.62	
2.	7.	1.	1.	6.						
2.	17	01	1.	06	01 Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Lampung	Jumlah layanan komponen instalasi listrik yang tersedia	12 bln	10,000,000.00	
2.	17	01	1.	06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Lampung	Jumlah layanan peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bln	25,000,000.00	
2.	17	01	1.	06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Lampung	Jumlah layanan barang cetakan yang tersedia	12 bln	13,121,091.62	
2.	17	01	1.	06	07 Penyediaan Bahan Material	Prov. Lampung	Jumlah layanan bahan material yang tersedia	12 bln	30,000,000.00	
2.	17	01	1.	06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Lampung	Jumlah layanan kunjungan tamu	12 bln	40,000,000.00	
2.	17	01	1.	06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Lampung	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	12 bln	327,623,000.00	
2.	1	0	1.	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	816,347,000.00	
2.	7.	1.	1.	8.						
2.	17	01	1.	08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Lampung	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	361,347,000.00	
2.	17	01	1.	08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Lampung	Jumlah Layanan jasa pelayanan umum kantor	12 bln	455,000,000.00	
2.	1	0	1.	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	424,000,000.00	
2.	7.	1.	1.	9.						
2.	17	01	1.	09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Lampung	Jumlah layanan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12 bln	75,000,000.00	
2.	17	01	1.	09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Lampung	Jumlah layanan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12 bln	289,000,000.00	
2.	17	01	1.	09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Lampung	Jumlah layanan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bln	10,000,000.00	
2.	17	01	1.	09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov. Lampung	Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bln	50,000,000.00	

1			2			3	4	5	6	7	
2.	17	02	1.	02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1. Lambar, 2. Lamsel, 3. Lamteng, 4. Lamtim, 5. Lamut, 6. Pringsewu, 7. Pesawaran, 8. Tanggamus, 9. Tuba, 10. Waykanan, 11. TBB	Jumlah koperasi yang difasilitasi pelayanan izin pembentukan dan pembukaan cabang/kantor koperasi	30 koperasi	265,803,000.00	
2.	1	0	7.	3.		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	37.74	150,000,000.00	
2.	17	03	1.	01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100%	150,000,000.00	
2.	17	03	1.	01	01	Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan Kepatuhan Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	1. Lamsel, 2. Tuba, 3. Lambar, 4. Lamteng	Jumlah Koperasi yang diawasi Kelembagaan dan Usahanya	40 Koperasi	75,000,000.00	
2.	17	03	1.	01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat Sehat Mandiri Tangguh serta Akuntabel	1. Lamteng, 2. Lambar, 3. Pringsewu 4. Lamsel	Jumlah Koperasi yang telah diperiksa kepatuhan terhadap ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan	40 Koperasi	75,000,000.00	
2.	1	0	7.	4.		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	64.29	100,000,000.00	
2.	17	04	1.	01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya	100%	100,000,000.00	

1			2			3	4	5	6	7	
2.	17	04	1.	01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	1. Lamtim, 2. Lamteng, 3. Mtero, 4. Lamsel, 5. Pringsewu	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	45 Koperasi	100,000,000.00	
2.	1	05				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	26.55%	2,582,464,000.00	
2.	17	05	1.	01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase SDM Koperasi Yang Meningkatkan Kompetensi dan Pengetahuannya	100%	2,582,464,000.00	
2.	17	05	1.	01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Prov. Lampung	Jumlah peserta pelatihan	916 UMKM	2,582,464,000.00	
2.	1	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	14.15	275,000,000.00	
2.	17	06	1.	01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha	100%	275,000,000.00	
2.	17	06	1.	01	02	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Prov. Lampung	Jumlah Koperasi yang meningkat daya saing usaha Koperasi dari sisi kualitas dan fasilitas usaha, permodalan serta perlindungan usaha koperasi	30 Koperasi	275,000,000.00	
2.	1	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	0.5	1,500,000,000.00	

1					2	3	4	5	6	7
2.	1	0	1.	0						
7.	7.		1.	0	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan	100%	1,500,000,000.00	
2.	17	07	1.	01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Prov. Lampung	Jumlah UMKM dan wirausaha pemula yang difasilitasi pengembangan usaha	100 UMKM	1,500,000,000.00
2.	1	0				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	2.26	318,000,000.00
2.	1	0	1.	0		Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya	100%	318,000,000.00
7.	7.	8.								
2.	17	08	1.	01	01	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Prov. Lampung	Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usahanya dari sisi permodalan, produksi dan pemasaran serta jaringan usahanya	175 UMKM	318,000,000.00
JUMLAH									17,860,921,000.00	

BANDAR LAMPUNG, OKTOBER 2021

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Lampung,

